

UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM BERAS MISKIN (STUDI KASUS KENAGARIAN TANJUNG BETUNG)

Siti Zulfah Lubis

NIP. 196004161986122001

Dosen Fisip UISU Program Studi Ilmu administrasi Negara

ABSTRAK

Raskin adalah Program Pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan agar mereka mendapat beras yang murah untuk kebutuhan rumah tangganya. Namun pada saat upaya tersebut di jalankan, tidak dapat berjalan seperti apa yang di harapkan, dikarenakan ada beberapa factor ekonomi masyarakat miskin di kenagarian Tanjung Betung, Kecamatan Ratu Selatan ini masih rendah. Sistem kolektif yang belum maksimal, Pembentukan tim yang belum berkompeten belum bekerja sesuai harapan, biaya operasional raskin belum maksimal, masih di temukannya beras dengan berkualitas rendah. Sumber daya aparatur masih rendah, lemah dalam melaksanakan fungsi control terhadap pelaksanaan program raskin di wilayahnya.

Beras Kenagarian Tanjung Betung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program raskin di kenagarian tanjung betung pada tahun 2016.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Beras Miskin di Kelurahan Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan. Tujuan penelitian Adalah memperjelas dan menghindari terjadinya kesimpangsiuran. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: bagaimana upaya penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Beras Miskin di kelurahan Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah masyarakat miskin yang terdaftar untuk mendapatkan raskin yang berjumlah 640 KK (Kepala Keluarga, jika

populasi lebih dari 100 orang maka sampel yang di ambil sebesar 10-15% atau lebih. Maka teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah mengambil 10% dari populasi yang berjumlah 640 KK, jadi sampelnya sebanyak 39 KK. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan menyebarkan angket (questioner) kepada responden serta melakukan kepada pihak-pihak terkait.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui program beras miskin di kenagarian tanjung betung dengan hasil nilai rata-rata dalam kategori sangat baik 48 orang responden, sedangkan yang menyatakan baik 16 orang responden. dalam program penanggulangan kemiskinan melalui beras miskin pengawasan sangat perlu di tingkatkan, agar mencapai tujuan yang maksimal

Kata Kunci : Kemiskinan, Beras Miskin

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya penanggulangan dalam artian, usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Raskin adalah salah satu program pemerintah yang membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Seperti di kelurahan tanjung betung . kecamatan rao selatan kabupaten pasaman ini.

Meskipun penduduk di keluhan ini sebagian besar mata pencahariannya petani biasa, buruh harian, perkebunan dan lain-lain. Akan tetapi daerah ini masih terus memperoleh bantuan subsidi dari pemerintah, hal ini dikarenakan seringnya

gagal panen, banyaknya hama ketika musim tanam sampai musim panen, tidak berfungsinya saluran irigasi, tidak tersedianya sarana dan prasarana pertanian, terbatasnya dana untuk membeli dan memperoleh pupuk dan tidak tersedianya lahan pertanian, dalam artian. Para pertanian harus mengolah sawah yang bukan miliknya sendiri, akan tetapi meminjam sawah dengan perjanjian yang telah di tentukan, petani yang mengolah lahan sering kali merugi dikarenakan seringnya gagal panen, dan yang berhasil panen merasa tidak sesuai dengan yang di harapkan, walaupun sebagian ada yang berhasil panen tapi hasil yang di peroleh sering tidak cukup untuk kebutuhan pangan sehari-sehari, seperti di daerah kelurahan tanjung betung ini masih tetap menerima bantuan subsidi beras miskin dari pemerintah, sayangnya sering kali program dari pemerintah ini sendiri tidak tepat sasaran. Program bantuan beras miskin dari pemerintah ini di khususkan hanya untuk masyarakat miskin. Peraturan perundang yang menjadi landasan pelaksanaan program raskin adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No.7 Tahun 1996, tentang pangan
2. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
3. Undang-undang No.47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara tahun Anggaran 2010
4. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002, tentang ketahanan pangan
5. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog
6. Peraturan Presiden RI No.13 Tahun 2009, tentang koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
7. Intruksi Presiden No.8 Tahun, tentang Kebijakan Perberasan Nasional
8. Keputusan Menko Kesro No.35 Tahun 2008, tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Terdapat beberapa unsure dalam raskin, antara lain adalah pedoman pelaksanaan program raskin, Tim Koordinasi Program Raskin Provinsi, Tim Raskin Revisi Regional (Divre), Satker Raskin, Tim Koordinasi Raskin.

Tidak semua masyarakat berhak atas raskin, hanya mereka yang tergolong miskin, rawan pangan dan mempunyai data yang lengkap seperti KTP dan KK yang mendapat hak untuk menerima raskin, akan tetapi yang menjadi masalah yang menikmati program ini bukan hanya masyarakat miskin tetapi masyarakat yang tergolong mampu ikut menikmati program subsidi dari pemerintah tersebut, dalam penyaluran beras miskin sering di temui kendala-kendala, kendalanya bisa dari masyarakat bahkan dari apatarurnya itu sendiri, sering di temui para pengelola raskin tersebut tidak jujur dan amanah dalam menjalankan tugas, sehingga terjadi kecurangan.

Ini karenakan data yang di peroleh dari pengurus kelurahan setempat seakan-akan dibuat-buat tanpa melihat langsung kelapangan dan sering kali pengurus di keluran lebih mengedepankan kepentingan keluarga, keluarga dekat dari pengurus kelurahan yang mengolah data untuk bantuan subsidi pemerintah mengedepankan keluarganya sebagai penerima dana subsidi pemerintah, walaupun keluarganya tergolong mampu. Sehingga subsidi dari pemerintah tidak tepat sasaran. Akibatnya mereka yang tergolong miskin yang berhak menerima bantuan subsidi dari pemerintah, pasalnya bagi mereka masyarakat miskin sering kali mendapat setengah, dalam 7,5 kg, hal ini di sebabkan pasokan dari pemerintah tidak cukup untuk mencakup masyarakat miskin di kelurahan tanjung betung, kuat dugaan sebagian pasokan beras miskin di alihkan oleh pengelola aparatur kelurahan, walaupun ini subsidi dari pemerintah hal ini tentu cukup memberatkan masyarakat miskin karena dalam 1 (satu) keluarga minimal ada tiga atau empat orang yang mau makan setiap harinya.

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui tentang "upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Beras Miskin" di kelurahan Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan masalah

Untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan maka perlu diadakan pembatasan masalah pada upaya penanggulangan kemiskinan melalui beras miskin di Kelurahan Tanjung Betung, Kec Rao Selatan, Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, maka penulis membuat pembatasan masalah yang menjadi acuan untuk melakukan penelitian :

2. Pembagian Beras Miskin bagi masyarakat yang menerima sejumlah 640 orang (KK)
3. Masyarakat yang mempunyai KTP dan KK Yang menerima raskin sejumlah 640 (KK) di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman

C. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Kemiskinan

Kemiskinan merupakan hal yang melekat pada Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kemiskinan, akan tetapi kemiskina nampaknya masih tetap menggerogoti Indonesia, kalau di tinjau tentang kemiskinan dari tahun ke tahun nampaknya tidak ada perubahan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan banyaknya dana telah di lontarkan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, tetapi hasilnya belum optimal, kemiskinan sering di hubungkan dengan keterbelakangan dan ketertinggalan. Disamping itu kemiskinan juga merupakan salah satu masalah sosial yang relevan dalam pemecahan masalah kemiskinan, perlu dipahami sebab-sebabnya dan menelusuri akar permasalahan kemiskinan, sehingga dapat di gali potensi sebenarnya yang terkandung dalam sumber daya masyarakat pedesaan.

2. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik sandang maupun pangan, secara umum boleh dikatakan bahwa timbulnya kemiskinan disebabkan oleh kombinasi dari tekanan populasi penduduk, kurangnya kualitas SDM, serta ketidak efisienan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Sementara itu, kebudayaan kemiskinan ini akan menghasilkan struktur sosial dan kepemimpinan yang bersifat larut oleh kondisi kemiskinan tersebut, karena kurangnya integrasi lingkungan miskin dalam pranata-pranata utama yang ada dalam masyarakat luas.

3. Penyebabkan Kemiskinan

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni :

- a. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam.
- b. Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang terjadi dikarenakan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin.

Perlu di sadari bahwa lembaga-lembaga dalam pasaran factor dan produk merupakan penentu penting mengenai bagaimana pembangunan memperngaruhikaum miskin. Perubahan struktual yang bertalian dengan pembangunan menimbulkan proses-proses yang sekaligus meningkatkan penyerapan sebagian tenaga kerja dan factor lain, serta menimbulkan relokasi-relokasi geografis dan sektoral bagi di gunakannya tenaga kerja dan faktor lain. Kebijakan yang terfokus pada

pertumbuhan tersebut akhirnya mengabaikan pemerataan pendapatan yang menciptakan ketimpangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Seperti dalam paradok kemiskinan, bahwa kemiskinan meningkat secara tajam tepat di tengah masyarakat yang kaya. Ajaran teori lama bahwa pemerataan akan dengan sendirinya makin baik setelah mencapai tingkat pembangunan tertentu (*rickie down effect*), dan untuk mengejar pertumbuhan cepat. Di pihak akibat majunya komunikasi massa global, adanya kemiskinan dan ketidak merataan ditengah kemajuan ekonomi, akan membawa dampak sosial politik yang justru sangat berbahaya bagi kelangsungan pembangunan. *Demonstration effect* dari pembangunan ekonomi Negara-negara lain besar pengaruhnya bagi pembangunan ekonomi Negara-negara lain besar pengaruhnya bagi pembangunan suatu Negara.

Jika bagian yang di peroleh kaum miskin turun lebih cepat dari peningkatan keseluruhan pendapatan itu, kaum miskin akan merugi oleh pertumbuhan itu, selain itu mereka untung . maka bagaimana pendapatan kaum miskin itu berubah dengan pembangunan ekonomi, amat penting untuk memahami masalah kemiskinan dan pemberantasannya. Tahap-tahap awal dari proses pembangunan, selama perekonomian yang kebanyakan bersifat agraris dengan industrialisasi, hamper selalu ditandai dengan kenaikan-kenaikan yang cukup besar dalam ketidak samaan dalam pembagian pendapatan. Bagian-bagian yang di terima oleh golongan termiskin merupakan seperlima, dua perlima dan tiga perlima dari jumlah penduduk semuanya, turun dengan tajam karena di ciptakannya suatu pulau kecil yang berpenghasilan tinggi di tengah lautan besar orang-orang yang berpenghasilan rendah.

Tahap-tahap selanjutnya dari proses pembangunan itu ditandai dengan naiknya bagian pendapatan yang diperoleh mereka yang terlibat dalam sektor ekonomi modern berpenghasilan tinggi, suatu pelebaran kesenjangan pendapat antara sektor berpenghasilan tinggi dan sektor berpenghasilan.

Rendah dalam perekonomian itu dan peningkatan dalam ketidaksamaan, baik dalam sektor yang berpenghasilan tinggi

maupun dalam sektor yang merupakan berpenghasilan yang rendah. Perpindahan penduduk dari sektor yang mengurangi ketidaksamaan. Dipihak lain, meningkatnya rata-rata diferensial pendapatan diantara sektor-sektor merupakan faktor-faktor yang menciptakan ketidaksamaan yang lebih besar.

Secara keseluruhan, kecenderungan adalah meningkatnya ketidaksamaan, paling tidak untuk sementara. Berbagai simulasi telah mengesankan bahwa meningkatnya ketidaksamaan ini akan cenderung berlanjut sampai sedikitnya separuh penduduk berada di sektor berpenghasilan tinggi . tidak ada kecenderungan dengan sendirinya untuk membaiknya pembagian pendapatan, selagi Negara-negara memasuki tahap terakhir dari peralihan mereka ke status sebagai Negara industri.

Naik tidaknya ketidaksamaan tergantung pada kebijakan-kebijakan yang ditakuti negara-negara, hal ini tergantung pada sejauh mana kebijakan-kebijakan yang di ikuti mempersempit kesenjangan antara sektor, sejauh mana mereka mengurangi penyebaran pendapatan dalam sektor modern yang relative cepat pnyerapan kedalam sektor modern.

D. Sekilas Tentang Raskin

Penyaluran raskin (beras untuk rumah tangga miskin) sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program operasi pasar khusus (OPK), kemudian diubah menjadi raskin mulai tahun 2002, raskin diperluas fungsinya tidak lain menjadi program darurat (*social safety net*) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penanaman raskin menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan raskin.

Penentuan kriteria penerima manfaat raskin seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan local melalui musyawarah desa/kelurahan. Masyarakat ini menjadi kekuatan utama

program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin.

E. Tinjauan Tentang Beras Miskin

Program bantuan beras miskin merupakan salah satu program dari pemerintah dalam bentuk bantuan pangan yang telah di atur dalam UU No.7/1996. Tentang pangan , PP No.68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan, inpres No.68 tahun 2002 tentang kebijakan perberasaan serta SKB mendagri dan dirut bulog tertanggal 22 Juli 2003.

Berpedoman dengan hal tersebut, pemerintah melaksanakan program raskin atau beras untuk keluarga miskin, dengan program ini, masyarakat miskin yang hidupnya memprihatinkan bisa bertahan hidup dan jika perlu dapat melakukan usaha kecil-kecilan guna meningkatkan kesejahteraannya. Karena sebagai mana kita ketahui bahwa kemiskinan masih menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia . sudah banyak strategi penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi masih saja belum dapat menurunkan angka kemiskinaan di Indonesia. Karena kemiskinan merupakan suatu kondisi yang menggambarkan keterbatasan, kekurangan dan ketidak mampuan, yang menyebabkan orang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masalah Kemiskinan yang terjadi di Indonesia lebih dikarenakan oleh :

- Sulitnya pemenuhan hak-hak dasar kehidupan manusia antara lain makanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pendapatan perkapita masyarakat.
- Kesenjangan pembangunan antara kota-kota besar di Indonesia dan juga antara kota dengan pedesaan dan daerah terpencil lainnya yang tentunya belum terjamaah pembangunan, dan juga potensi sumber daya alam yang berbeda.
- Guncangan perekonomian sebagai akibat dari lemahnya dasar perekonomian Indonesia, yang mengakibatkan banyaknya pengangguran.
- Kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan, dimana kurangnya perhatian pemerintah

dalam mengikut sertakan atau memberdayakan perempuan dalam pembangunan.

- Kultur dan budaya daerah yang turut mempengaruhi.

Oleh karena itu salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yaitu dengan program bantuan beras miskin yang merupakan kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat. Berdasarkan instruksi presiden nomor 5 tahun 1993 tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan, merupakan dasar formal, yang menimbang antara lain.

1. Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Peneliti hanya mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan penguji hipotesis. Oleh sebab itu penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu keadaan atau peristiwa subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (fact finding).

URAIAN TEORITIS

1. Pengertian kemiskinan

Miskin di definisikan sebagai ketidak mampuan berpartisipasi dalam bermasyarakat secara ekonomi, sosial, budaya dan politk. Dalam hal lain, miskin harta dapat di artikan sebagai ketidak mampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan dan tidak mampu untuk menyediakan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Sedangkan miskin ilmu dapat diartikan sebagai suatu yang mampu untuk menungjang kehidupannya. Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multidimensional. Secara umum kondisi kemiskinan ditandai dengan kerentanan, ketidak berdayaan, keterisolasian, oleh karena sifat

kemiskinan yang multidimensi tersebut maka kemiskinan telah menyebabkan akibat yang juga beragam dalam kehidupan nyata, antara lain :

1. Secara sosial ekonomi menjadi beban masyarakat
2. Rendahnya kualitas dan Produktivitas masyarakat
3. Rendahnya partisipasi masyarakat
4. Menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
5. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
6. Merosotnya mutu generasi yang akan datang

Semua indikasi tersebut merupakan kondisi yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain (Depkimpraswil, 2002). Secara umum kemiskinan lazim didefinisikan sebagai seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lain, antara lain. Tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

Sedangkan seorang sosiolog E.J. Habsbown menyatakan bahwa kemiskinan itu tidak selalu diartikan dengan kemiskinan itu sendiri, akan tetapi dapat digambarkan menurut yang terjadi di masyarakat (E.J.habsbown, dalam jafar hafsa 2008:10)

Menurut niels mulder kemiskinan adalah mereka yang tidak sampai pada suatu tingkat kehidupan yang minimal seperti ditunjukkan oleh garis kemiskinan yang mengungkapkan taraf minimal untuk bisa hidup dengan kecukupan yang wajar. Mereka yang tidak sampai pada patokan itu dapat dipandang sebagai orang miskin (Niels Mulder, 1973:93).

Definisi beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya . kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok

orang dalam menjalani kehidupan secara bermanfaat.

Hak-hak dasar secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan dan lingkungan hidup. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hal-hal untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik perempuan maupun laki-laki, hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti : tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri, kemiskinan dapat dibagi menjadi empat bentuk, yaitu :

- a. Kemiskinan absolute : Bila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja .
- b. Kemiskinan relatif : Kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- c. Kemiskinan kultural : Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, boros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. Kemiskinan struktural : situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kelompok masyarakat ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mudah untuk melakukan perubahan, menolak untuk

melakukan perkembangan dan tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya, akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai oleh masyarakat pada umumnya (Gunawan, 1998 :28-29)

Menurut David dalam Suharto (Suharto : 132-133) membagi kemiskinan dalam berbagai dimensi yaitu :

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Negara-negara maju selalu tahu apa yang akan dilakukannya untuk bersaing dengan siapa aja. Sedangkan Negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggir oleh persaingan pasar bebas karena ketidakmampuan, masyarakat .
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsistem (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan). Kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang di alami oleh perempuan, anak-anak, kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekunesial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal diluar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Pandangan lain tentang kemiskinan dikemukakan oleh Nashier (2001:14), terdapat lima penyebab kemiskinan yaitu : **Pertama**, kemiskinan berkaitan dengan nasib, takdir atau sesuatu diluar kemampuan manusia. **Kedua**, kemiskinan disebabkan oleh pendidikan rendah, kekurangan gaji dan lainnya. **Ketiga**, kemiskinan karena pengawasan yang lemah sehingga menimbulkan korupsi, manajemen tidak efektif dan hukum tidak jalan. **Keempat**, kemiskinan karena adanya penghisapan uang

rakyat oleh penguasa yang cenderung menipu rakyat, dan **Kelima**, kemiskinan karena tidak adanya keadilan tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Pendapat lain di utarakan oleh Elis dalam Suharto (2006:133) yaitu dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, sosial, politik, sosial psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Parameter yang lazim digunakan para analis dalam menetapkan jumlah kemiskinan adalah lebih cenderung pada pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok. Dari hal ini, seseorang dikatakan miskin manakala dalam pemenuhan kebutuhan yakni makanan, asupan kalori, kemiskinan juga diukur dengan menambahkan parameter pemenuhan kebutuhan pokok/dasar non makanan yang meliputi pendidikan, sandang dan hal-hal yang dikemukakan di atas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam menentukan kemiskinan terdapat variable pokok yang tidak bisa di lupakan yakni terkenal dengan istilah garis kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terbagi menjadi dua bagian yakni, garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). Adapun komponen dari masing-masing indikator adalah (GKM) lebih berbasis pada pendekatan pemenuhan asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita. Sedangkan komponen GKBM adalah seperti pendidikan dan kesehatan.

Paparan teoritis di atas memberikan pemahaman bahwa konsep dan penyebab kemiskinan meliputi banyak aspek, baik berupa ketidakberdayaan masyarakat menghadapi kekuatan dan kekuasaan, maupun dalam bentuk kondisi kekurangan. Strategi pemerintah mengatasi kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Pemberdayaan (empowerment) secara umum merupakan proses penyadaran masyarakat menjadi mandiri, tidak tergantung dan mampu menghadapi segala tantangan dalam kehidupannya. Shardlow dalam Adi (2003) mengatakan bahwa pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (Adi,2003:54)

Konsep pemberdayaan masyarakat dapat di katakan merupakan jawaban atas realitas ketidakberdayaan. Prinsip memperlakukan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan harus menjadi komitmen bagi pelaksanaan pmbangunan.

Idealnya pemerintah dapat menjadi fasilitator yang bertugas memberi pelayanan, sedangkan pihak masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan yang saat ini harus di layani dan dibutuhkan prakarsa serta partisipasinya.

Konsep yang sering muncul dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah konsep kemandirian dimana progam-progam pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan (Suriadi. 2005: 53)

Selain itu pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah adalah upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dan daerah agar dapat mencegah masalah-masalah yang di hadapi dengan kekuatan sendiri secara berkesinambungan. Dijelaskan oleh Heru Nugroho (Awan, 1999 :34) Bahwa selama ini persoalan penanggulangan kemiskinan hayalah bersifat ekonomi semata sehingga apabila kebutuhan ekonomi sudah tercapai seolah-olah progam atau proyek penanggulangan kemiskinan juga ikut selesai. Diperlukan juga adanya pemberdayaan yang bertujuan menekan perasaan ketidak berdayaan masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial politik.

Dalam pandangan yang berhubungan dengan konsep perberdayaan, Sunyoto Usman (1999 : 63) berpendapat bahwa :

“Paling tidak ada dua macam perspektif pendekatan pemberdayaan

yaitu **pertama** perpektif yang memfokuskan perhatian pada alokasi sumber daya (*resourction allocation*) yakni kelompok masyarakat yang di anggap sebagai unit analisis dari (atau paling tidak) berkaitan dengan sindrom kemiskinan yang melekat pada kehidupan sekelompok masyarakat. **Kedua** erspektif yang memfokuskan perhatian pada penampilan kelembagaan (*institution performance*) yakni ketidak berdayaan dianggap sebagai konsekuensi dalam bentuk pengelolaan pelayanan yang dikriminatif (hanya menguntungkan kelompok tertentu)

Kedua perspektif tersebut memberikan pemahaman bahwa kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat pada intinya disebabkan karena ketidakmampuan dan ketidakmandirian masyarakat itu sendiri. Paulo freire melihat bahwa pemberdayaan adalah proses penyadaran seseorang atau sekelompok orang terhadap realitas potensi yang dimilikinya menuju kebebasan diri dan kolektif dari tekanan dan dominasi struktur kelembagaan (Lambang Trijono, 2002 : 4)

Menurut Ginandja Kartasasmita (1996 : 144) bahwa memberayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu pemberdayaan dalam konteks ini adalah merupakan kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat yang bersangkutan. Penjelasan teoritis diatas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah di perlukan suatu usaha untuk mempercepat pemulihan dampak krisis ekonomi dan peningkatan kemampuan lembaga-lembaga desa dan kabupaten melalui kebijakan pemerintah. Dengan demikian progam beras miskin dari pemerintah merupakan kebijakan publik dari pemerintah saat ini untuk

membangun keberdayaan masyarakat.

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Upaya merupakan suatu usaha yang dilakukan atau mencari jalan keluar dari berbagai masalah untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan bersama, Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan suatu usaha yang di lakukan pemerintah dengan berbagai progam-progam untuk menanggulangi kemiskinan yang ada. Di Indonesia sendiri progam-progam ini sudah berjalan sejak lama, sama seperti di Nagari Tanjung Betung ini, bidang pengembangan ekonomi dan pengentasan kemiskinan merupakan faktor yang sangat penting didalam kelangsungan hidup bernagari, jika ekonomi masyarakat morat-marit tentunya ini akan berdampak pada kemiskinan. Sesuai dengan kondisi monografis Nagari Tanjung Betung bahwa sumber mata pencaharian/ekonomi masyarakat pada umumnya bergerak di bidang pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Melihat luas lahan yang ada serta banyaknya potensi Sumber Daya Alam Nagari Tanjung Betung dimanfaatkan dengan baik dan benar untuk kemakmuran masyarakat Nagari, Berangkat dari kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Nagari maka pemerintah Nagari Tanjung Betung melakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut :

- a. Belum tertanamnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan dengan baik dan benar.
- b. Masyarakat pada umumnya masih memakai cara bertani tradisional yang didapatkan secara turun-temurun.
- c. Kurang sarana dan prasarana penunjang pertanian, perkebunan dan lain-lain
- d. Masih minimnya sektor permodalan di masyarakat untuk melakukan usaha.dan sering kali tergantung pada tengkulak.
- e. Masih kurangnya peran serta pemerintahan Nagari dalam membuat suatu peraturan-peraturan yang mengatur tentang usaha-usaha pertanian dan kenyamanan si petani dalam usaha.

- f. Selama ini bantuan pemerintah telah banyak di kucurkan kepada masyarakat Nagari, akan tetapi belum bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar.
- g. Kurangnya wadah /kelompok untuk menyamakan presepsi dalam melakukan usaha pertanian.
- h. Masih belum memadainya sarana pendidikan di tengah-tengah masyarakat Nagari Tanjung Betung,padahal faktor pendidikan adalah faktor yang tidak kalah penting untuk membentuk karakter manusia yang seutuhnya dan jika faktor ini terabaikan maka akan berakibat kepada angka kemiskinan yang akan menimbulkan masalah sosial baru.
- i. Masih kurangnya tenaga kesehatan dan sarana penunjang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat karena masyarakat tidak akan dapat melakukan aktifitas usahanya jika sering sakit-sakitan.
- j. Belum adanya investor atau badan usaha pihak ketiga yang berminat menanamkan modalnya di Nagari Tanjung Betung padahal Nagari Tanjung Betung sumber daya mineral yang cukup besar seperti biji besi,emas,panas bumi dan lain-lain.
- k. Masih belum terkelola industry rumah tangga dan industri kecil dengan baik di tengah-tengah masyarakat
- l. Tingginya angka kemiskinan di Nagari Tanjung Betung.

4. Prosedur Penyaluran Raskin

Penyaluran RASKIN berawal dari surat pemerintah Alokasi (SPA) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Perum BULOG dalam hal ini kepada Kadivre/Kasubdivre/KaKansilog Perum bulog berdasarkan pagu Raskin (tonase dan jumlah Rumah Tangga Sasaran – RTS) dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Nagari/Kelurahan. Pada waktu beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi, Perum bulog bedasarkan SPA menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang /Delivery Order (SPPB/DO) beras

untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/ Kelurahan kepada Satker Raskin. Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di titik Distribusi.

Di Titik Distribusi, penyerahan/ penjualan beras kepada RTS-PM (Penerima Manfaat) Raskin dilakukan oleh salah satu dari tiga (3) Pelaksana Distribusi Raskin yaitu Kelompok Kerja (Pokja). Atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) Di Titik Distribusi inilah terjadi secara tunai dari RTS – PM RASKIN ke Pelaksana Distribusi.

5. Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Raskin

Untuk mengoptimalkan bantuan raskin kepada masyarakat miskin pemerintah harus berperan aktif dalam pengawasan distribusi raskin agar pembagian raskin benar-benar tepat sasaran sehingga tidak terjadi kesalahan atau penyelewengan dalam proses distribusi raskin kepada masyarakat yang betul-betul berhak mendapatkan bantuan raskin dari pemerintah.

Oleh sebab itulah pemerintah membentuk suatu tim koordinasi yang mengawasi proses pelaksanaan penyaluran raskin yang diketuai oleh menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat, sedangkan yang mengawasi di tingkat nagari/lurah yaitu kepala desa/lurah. Dan tim koordinasi tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang di jelaskan sebagai berikut :

- Tim koordinasi raskin pusat tugasnya yaitu melakukan koordinasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, dan evaluasi. Sedangkan fungsinya yaitu mengkoordinasi perencanaan dan penganggaran program raskin, menyusun pedoman untuk penyaluran raskin, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program raskin di provinsi dan kabupaten/kota.
- Tim Koordinasi raskin provinsi tugasnya yaitu melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi,

pelaksanaan distribusi, dan menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi raskin pusat. Sedangkan fungsinya yaitu koordinasi perencanaan dan penganggaran program raskin provinsi, penetapan pagu raskin kabupaten/kota, pelapor pelaksanaan raskin kepada tim koordinasi raskin pusat .

- Tim koordinasi Raskin Kabupaten/kota tugasnya yaitu melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, dan menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Raskin provinsi. Sedangkan fungsinya yaitu koordinasi perencanaan dan penganggaran program raskin kabupaten/kota, penetapan pagu kecamatan, pelaksanaan verifikasi data RTS-PM, perencanaan penyaluran raskin, desa/kelurahan.
- Tim koordinasi Raskin kecamatan tugasnya yaitu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi ditingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Raskin kabupaten/kota. Sedangkan fungsinya yaitu perencanaan penyaluran raskin di kecamatan, pelaksanaan verifikasi RTS-PM, penyediaan dan pendistribusian raskin, pelaporan pelaksanaan Raskin kepada tim koordinasi Raskin kabupaten/kota.
- Tim koordinasi di desa tugasnya yaitu memeriksa, menerima, dan menyerahkan beras, menerima uang HPB serta menyelesaikan administrasi. Sedangkan fungsinya yaitu melakukan pendistribusian dan penyerahan raskin kepada RTS-PM di titik bagi, penerima HBP Raskin dari RTS-PM secara tunai menyetorkan ke rekening bank yang ditunjuk Perum Bulog atau menyerahkan langsung kepada Setker Raskin, penyelesaian

administrasi penyaluran raskin yaitu berita acara serah terima dan daftar realisasi penjualan beras dan melaporkan ke tim raskin kecamatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Upaya penanggulan kemiskinan melalui program beras miskin di nagari tanjung betung belum berhasil dengan baik seperti yang diharapkan, hal ini di karenakan pembagian beras miskin di lokasi tidak tepat sasaran, dari 640 KK yang berhak menerima beras miskin dan yang berhak menerima penyaluran beras miskin mangkin sering terlambat hal ini di karenakan jauhnya lokasi dari pusat kota ke lokasi pendistribusian.
2. Untuk lebih mengoktimalkan bantuan raskin pemerintah membentuk tim koordinasi mulai dari pusat hingga kenagariaan yang di ketahui oleh pemerintahan guna mengawasi proses pendistribusian raskin kepada sampai pada tujuannya dengan tujuan agar semua warga mengetahui dan ikut memantau pelaksanaan penyaluran raskin, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam penyalurannya.
3. Dengan adanya bantuan beras miskin dapat mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Saran

Beberapa saran-saran yang dikemukakan penulis setelah melihat realitas kehidupan masyarakat miskin di Kenagarian Tanjung betung demi tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih baik. Peneliti memberikan saran yang semoga menjadi bahan renungan dan masukan kepada semua yang terkait:

1. Disarankan kepada seluruh Instansi terkait baik pemerintah setempat dan dinas kesejahteraan sosial bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam hal ini aparat pemerintahan (Lurah dan Tokoh masyarakat setempat) untuk berjuang langsung kelapangan melihat realitas sebenarnya dalam pembagian beras miskin benar benar tepat sasaran.

2. Diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini Bappenas, dan dinas kesejahteraan sosial untuk tetap melanjutkan bantuan yang telah ada dan memberikan bantuan yang sifatnya memberdayakan masyarakat agar masyarakat dapat mandiri dan lepas dari jaringan-jaringan kemiskinan yang selama ini melekat dari sistem yang ada.
3. Diharapkan dalam pembagian dan pengelolaan data raskin benar-benar data yang valid, agar supaya mereka tergolong miskin merasa adil dalam pembagian raskin tersebut. Dalam hal ini peneliti berpendapat, dalam upaya penanggulan kemiskinan, dana yang di lontarkan oleh pemerintah perlu di tinjau ulang, bukan cuman raskin tetapi dana BLSM dan sebaiknya, bukan hanya mereka yang tergolong masyarakat sejahtera yang ada kaitannya dengan pengurus atau kelurahan yang mendapat bantuan, akan tetapi mereka tergolong sangat miskin dan benar-benar sangat membutuhkan bantuan pemerintah, oleh sebab itu perlu di tinjau ulang agar supaya tidak terjadi kecurangan dan penyelewengan terhadap terhadap bantuan dari pemerintah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang No.7 Tahun 1996, Tentang Pangan
- Undang Undang No.32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang No.47 Tahun 2009 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2010
- Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, Tentang Ketahanan Pangan.
- Peraturan Pemerintah No. 07 tahun 2003 Tentang pendirian perusahaan Umum Bulog.
- Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulan Kemiskinan.

Siti Zulfah Lubis : Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program

Moh. Najir. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia Jakarta, Hal 133

Tatang M. Arifin. Menyusun Rencana Penelitian. CV. Rajawali. Jakarta, 1987, Hal 95.

Umar Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. Metode Penelitian Sosial : Bumi Aksara Jakarta

K. Yin, Robert, 2004. Studi Kasus: Desain dan Metode Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

E.J Habsbown, 1972. Dalam Pengetasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Niels Mulder, Kepribadian Jawa Dan Pembangunan Nasional, Yogyakarta : UGM Press, hal,93